

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kekuasaan rezim Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun harus berakhir pada tahun 1998, tepatnya pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.05 WIB di Istana Merdeka ketika Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden di hadapan ketua Mahkamah Agung (MA), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan pejabat negara lainnya.

Salah satu faktor runtuhnya Orde Baru ialah karena krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, pada awalnya krisis moneter ini melanda negara Thailand pada Juli 1997 kemudian meluas ke negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Krisis moneter ini mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun terhadap dollar AS, pada Oktober 1997 nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp. 4000/US\$, pada Januari 1998 nilai rupiah berada di level sekitar Rp. 17.000/US\$, hal tersebut berdampak terhadap kebangkrutan beberapa perusahaan di Indonesia.¹ Krisis keuangan di Indonesia saat itu pun masih terus berlanjut, pemerintah sudah melikuidasi 16 bank swasta, paket dari *International Monetary Fund* (IMF) sebanyak 23 milyar dolar AS sudah dijanjikan.² Kesepakatan dengan IMF ini juga

¹ Taufik Abdullah, *Indonesia Dalam Arus Sejarah jilid 8: Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve dengan KEMENDIKBUD, 2013), h.617

² Denny J.A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h.17

merupakan tahapan awal pelaksanaan reformasi ekonomi dan perbankan yang tertuang dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* yang ditandatangani pada awal November 1997, program reformasi tersebut juga telah mendapat dukungan teknis dan keuangan dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan negara-negara sahabat lainnya.³ Keterlibatan dan intervensi IMF tersebut ternyata belum mampu membawa perbaikan, nyatanya perekonomian dan kondisi sosial politik di Indonesia semakin tak menentu bahkan di ambang kehancuran.

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk mengakibatkan terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), buruh, dan masyarakat sipil menuntut agar pemerintah menurunkan harga sembako, menindak tegas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Gerakan demonstrasi itu sangat sistematis dan progresif karena mampu melampaui batas-batas agama dan ras, gerakan ini disatukan oleh isu bersama menuntut perubahan sistem politik dan ekonomi secara substansial.⁴

Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hingga 1998 ini bukan hanya memporak-porandakan perekonomian Indonesia saja, di bidang politik Presiden Soeharto yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari tiga

³ Unit Khusus Museum Bank Indonesia. 'Sejarah Bank Indonesia: perbankan Periode 1997-1999'. Artikel diakses pada 5 Juli 2018, dari

<https://www.bi.go.id/.../f2310af43715441bb8d57d865ea7987cSejarahPerbankanperiode19971999>

⁴ Denny J.A, *Op.Cit.*, h.27-28

dasawarsa atau untuk ketujuh kalinya terpilih kembali secara aklamasi di Sidang Umum MPR mulai mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, maraknya praktek KKN di lingkungan Istana Negara, seperti pada saat Presiden Soeharto memasukkan puteri sulungnya Siti Hardiyanti Rukmana di dalam Kabinet Pembangunan VII sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, kebijakan nepotisme itu membuat kepercayaan masyarakat menurun hingga berujung pada demonstrasi menuntut Soeharto untuk mundur dan melakukan reformasi total di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Di bidang sosial, situasi krisis yang terus memburuk mengakibatkan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kerusuhan terhadap etnis Tionghoa yang terbesar terjadi di Medan, Jakarta, dan Surakarta. Kerusuhan rasial ini semakin tak terkendali ketika perusahaan dan toko-toko milik etnis Tionghoa juga mengalami penjarahan dan pengrusakan oleh para demonstran terutama di Mall Cinere, Pasar Cempaka Putih, Pasar Minggu, Pasar Inpress Koja, Pasar Tanah Abang, dan pusat pertokoan elektronik terbesar di Asia Tenggara di daerah Glodok juga ikut dijarah dan dibakar massa. Pemerintah menjelaskan bahwa kerusuhan massa yang terjadi di Jakarta 13-14 Mei lalu menelan kerugian material senilai sekitar Rp. 2,5 triliun.⁵

Krisis yang semakin multikompleks ini membuat gerakan mahasiswa yang telah lama mengalami tindakan represif oleh rezim Orde Baru mulai bergerak secara sistematis, untuk memudahkan mengorganisir dan mengkonsolidasikan gerakannya mulai muncul berbagai “kelompok aksi”, antara lain: Forum Kota

⁵ Fadli Zon, *Politik Huru-Hara Mei 1998* (Jakarta: Institute for Policy Studies, 2004), h.104

(Forkot) yang didirikan pada 7 Maret 1998 dengan basis 16 kampus se-Jakarta merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengkoordinir berbagai aksi di Jakarta, selain Forkot di Jakarta lahir juga Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) pada 23 Maret 1996 yang juga turut aktif dalam berbagai aksi untuk menumbangkan rezim Orde Baru dan menuntut reformasi. Pada tanggal 12 Oktober 1998 Forkot mengalami perpecahan yang ditandai dengan munculnya Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED), para aktivis FAMRED yang dulu bergabung di Forkot juga terlibat bahu membahu dalam upaya merealisasikan reformasi total.⁶

Selain Forkot, FKSMJ, FAMRED dan aliansi gerakan mahasiswa lainnya, lahir juga aliansi yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).⁷ KAMMI dideklarasikan pada Minggu 29 Maret 1998 atau bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1418 H jam 13:30 di Aula Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), sesaat setelah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Nasional X secara resmi ditutup oleh Pembantu Rektor II UMM.⁸ Deklarator sekaligus Ketua Umum pertama KAMMI adalah Fahri Hamzah dari Universitas Indonesia dan Haryo Setyoko sebagai Sekretaris Umum dari Universitas Gajah Mada.

Terpilihnya Fahri Hamzah sebagai Ketua Umum KAMMI dan Haryo Setyoko sebagai Sekretaris Umum tidak terlepas dari rekam jejak mereka dalam

⁶ Taufiq R dan Herry S, *Reformasi Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Yayasan Swadaya Bhakti Mahasiswa, 2000), h.107

⁷ Selanjutnya disingkat KAMMI

⁸ Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi* (Solo: Era Intermedia, 2003), h.97

gerakan Tarbiyah dan mahasiswa, keterlibatan Fahri Hamzah dalam gerakan Tarbiyah terlihat jelas setelah reformasi, ketika sebagian besar kader gerakan Tarbiyah menyetujui pembentukan partai politik, Fahri Hamzah termasuk kedalam 52 deklaratator Partai Keadilan (PK).⁹ Kapabilitas Fahri Hamzah sebagai Ketua Umum juga terlihat ketika mampu menjadi salah satu pemimpin terkemuka dalam gerakan mahasiswa pada saat proses transisi dari Orde Baru menuju reformasi berlangsung.

Sejak kelahirannya KAMMI langsung terlibat aktif dalam berbagai aksi, hal itu terbukti dengan dilaksanakannya aksi pertama kalinya pada tanggal 10 April 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar Jakarta yang mengangkat isu “reformasi total”, dan secara khusus menuntut pencabutan asas tunggal dan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penegakan demokrasi yang menjadi landasan dasar berbagai aksi demonstrasi dan upaya penghapusan dwifungsi ABRI jelas bukan sekadar menuntut hilangnya militer di badan legislatif (DPR) belaka, tetapi lebih jauh dari itu yaitu bermakna upaya pergantian dari rezim otoriter militer menuju rezim demokratis.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aksi-aksi KAMMI dan berbagai gerakan mahasiswa lainnya ialah untuk menuntut pergantian sistem pemerintahan kearah demokrasi atau yang lebih populer di kalangan mahasiswa dan rakyat Indonesia ialah menuntut reformasi total, selain mengangkat isu “Reformasi Total” aksi KAMMI yang merupakan aksi gerakan

⁹ Fahmi Irhamsyah, *Peranan K.H. Rahmat Abdullah Dalam Gerakan Tarbiyah di Indonesia (1972 – 2001)*, (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2009), h.85

¹⁰ Taufiq R dan Herry S, *Op.Cit.*, h.142

mahasiswa pertama yang dilakukan di luar kampus ini menjadi sorotan berbagai media massa. Aksi yang dilaksanakan pada Jumat Sore 10 April 1998 di Masjid Al-Azhar tersebut terdapat perbedaan pemberitaan jumlah massa aksi yang hadir, ada yang memberitakan dengan sedikitnya sekitar 5.000 (Republika, 11 April 1998) dan 10.000 (Jakarta Post, 11 April 1998)¹¹ serta sebanyak 20.000 (Gatra, 18 April 1998).¹² Aksi tersebut dihadiri dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, bahkan ibu-ibu rumah tangga juga turut hadir menyuarakan aspirasinya, aksi dengan jumlah massa besar itu juga berlangsung tertib dan aman.

Aksi KAMMI yang dilaksanakan kurang dari sebulan dari dideklarasikannya pada 29 Maret 1998, menimbulkan berbagai pertanyaan dari media dan masyarakat luas, misalnya, bagaimana caranya KAMMI bisa menghadirkan jumlah massa sebanyak itu? dan bagaimana caranya untuk mengkonsolidasikan massa agar tertib dan aman selama aksi berlangsung? serta berbagai pertanyaan lainnya.

Jika ditelusuri bagaimana KAMMI lahir dan dari pola pengkaderan atau *manhaj* perjuangannya, maka dapat diketahui bahwa KAMMI secara tidak langsung merupakan anak kandung gerakan Tarbiyah, gerakan Tarbiyah yang sudah begitu massif jaringannya di tengah-tengah masyarakat dan gerakan mahasiswa, dengan mudah dimanfaatkan oleh KAMMI yang sebagian besar

¹¹ Richard G. Kraince, "The Role of Islamic Student Groups in The Reformasi Struggle KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)," *Jurnal STUDIA ISLAMIKA: Indonesian Journal For Islamic Studies*, Vol 7 No. 1, 2000, hal.12

¹² Lihat *Gatra*, edisi 18 April 1998

kadernya merupakan kader gerakan Tarbiyah untuk mengkonsolidasikan dan menghadirkan massa dengan jumlah sebanyak itu.

Gerakan Tarbiyah pada era 1980-an hingga awal 1990-an menampakkan diri sebagai sebuah gerakan keagamaan, gerakan ini melakukan penetrasi yang lebih intensif di kampus-kampus dan sekolah-sekolah, di kampus mereka bergerak dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sedangkan di sekolah mereka bergerak melalui Lembaga Dakwah Sekolah (LDS).¹³ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama periode 1980-an hingga 1990an gerakan Tarbiyah memfokuskan pengkaderannya dengan merekrut kalangan muda muslim terdidik di berbagai sekolah dan kampus-kampus.

Melalui Lembaga Dakwah Kampus inilah gerakan Tarbiyah memasifkan pengkaderannya di kampus-kampus, dalam perkembangannya LDK pada tahun 1986 membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) untuk mengkonsolidasikan serta mengkoordinasikan antar lembaga dakwah kampus se-Indonesia. Dari FSLDK inilah secara tidak langsung KAMMI terbentuk setelah agenda FSLDK Nasional X resmi ditutup pada 29 Maret 1998, hal tersebut sejalan dengan pernyataan Sekertaris Umum KAMMI Haryo Setyoko bahwa “KAMMI beranggotakan individu-individu yang punya basis kultur religius, yang selama 20 tahun aktivitasnya di LDK terus terjadi penguatan-penguatan visi keagamaan dan juga politik.”¹⁴ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelahiran KAMMI diinisiasi oleh kader-kader yang tergabung dan terlibat pembinaan di

¹³ Abdurakhman, *Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Ormasi Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional* (Depok: UI, 2013), h.141

¹⁴ Amin Sudarsono, *Ijtihad Membangun Basis Gerakan* (Surabaya: Pustaka Saga, 2016), h.16

LDK, maka tidak heran ketika awal-awal terbentuknya KAMMI sebagian besar kadernya berasal dari LDK.

Setelah berhasil menjadi salah satu aktor reformasi, KAMMI yang pada awal kelahirannya berbentuk “kelompok aksi” kemudian mengubah format gerakannya menjadi Organisasi Massa (Ormas), hal tersebut dirumuskan dan disepakati dalam agenda Mukhtar I Nasional KAMMI pada tanggal 1-4 Oktober 1998 di Islamic Center Bekasi. Pada Mukhtar pertama KAMMI ini hadir juga tokoh-tokoh nasional, salah satunya dihadiri dan ditutup oleh tokoh penting reformasi yaitu Dr. Amien Rais yang kemudian diangkat sebagai anggota kehormatan KAMMI.¹⁵ Kehadiran Amien Rais sebagai salah satu aktor penting dalam proses reformasi sehingga mendapatkan gelar “bapak reformasi” juga semakin menegaskan KAMMI menjadi salah satu unsur penting dalam proses reformasi.

Pada agenda Mukhtar I Nasional KAMMI ini selain berhasil mengubah bentuk KAMMI menjadi organisasi massa dan pergantian estafet kepemimpinan dari Fahri Hamzah ke Fitra Arsil, dirumuskan juga draft awal tentang muatan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang di dalamnya dijelaskan mengenai Visi-Misi, Asas, Prinsip Perjuangan, Karakter, dan Paradigma Gerakan serta Posisi Politik KAMMI di tengah-tengah masyarakat.¹⁶ Mukhtar pertama ini merupakan agenda nasional pertama KAMMI sejak kelahirannya, agenda ini menjadi peristiwa penting yang menandai awal KAMMI menjadi organisasi

¹⁵ Andi Rahmat dan Muhammad Najib, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus* (Surabaya: Pustaka Saga, 2015), h.141

¹⁶ Mahfudz Sidiq, *Op.Cit.*, h.209

terstruktur dan sistematis mulai dari perubahan bentuk organisasi hingga dirumuskannya AD/ART dan GBHO.

Pada awal kelahirannya KAMMI sebagai organisasi pengkaderan (*Harokatut Tajnid*) menekankan sistem kaderisasinya kepada pemahaman dan penerimaan kader KAMMI terhadap ideologi gerakan dan latar belakang kelahirannya. Para kader KAMMI diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan ideologi KAMMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan sistem kaderisasi di KAMMI mulai dilakukan pada bulan Oktober 1998 setelah pelaksanaan Mukhtar KAMMI yang pertama.¹⁷

Hal tersebut disebabkan sebelum muktamar belum ada suatu panduan pengkaderan yang sistematis dan baku, barulah setelah Mukhtar terdapat AD/ART dan draft awal GBHO yang menjadi panduan dalam berorganisasi maupun pengkaderan, draft awal GBHO hasil Mukhtar I KAMMI kemudian dirumuskan kembali dan disahkan pada agenda Mukhtar II KAMMI di Yogyakarta pada bulan November tahun 2000, dengan disahkannya GBHO ini KAMMI pada fase ketiga perjalanannya telah memiliki perangkat ideologi gerakannya sehingga konsep dan proses kaderisasi KAMMI telah berjalan secara sistematis dan efektif.

Dalam perkembangannya sistem kaderisasi KAMMI kemudian mengalami perubahan orientasi pengkaderan, pada Lokakarya Nasional Kaderisasi KAMMI

¹⁷ *Ibid.*, h.225

di Sukabumi pada tanggal 29 Desember 2005-1 Januari 2006 disepakati bahwa orientasi pengkaderan KAMMI adalah melahirkan kader KAMMI yang memiliki karakter Muslim Negarawan. Muslim Negarawan adalah kader KAMMI yang memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan, idealis, konsisten, berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa, serta mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan.¹⁸

Untuk melahirkan kader KAMMI yang memiliki karakter Muslim Negarawan, maka harus ditunjang oleh suatu sistem kaderisasi yang mapan dan dapat menjadi pedoman pengelolaan pengkaderan secara nasional, maka dalam Forum Lokakarya Nasional Kaderisasi KAMMI di Sukabumi pada tanggal 29 Desember 2005 - 1 Januari 2006 juga menghasilkan sistem kaderisasi yang disusun dalam sebuah buku kurikulum pengkaderan atau pedoman pengelolaan pengkaderan nasional yang bernama *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M.¹⁹

Sistem kaderisasi KAMMI kemudian mengalami perubahan pada tahun 2011, *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M kemudian digantikan oleh *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M.²⁰ Dalam *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M ini lebih sistematis dan terukur setiap proses

¹⁸ Tafsir Muslim Negarawan, *Manhaj Pengkaderan KAMMI*, (Jakarta: kammipress, 2014), h.14-15 dikutip langsung (atau tidak langsung) oleh Dharma Setyawan, *KAMMI Beyond Politics* (Malang: Sabuk Pustaka, 2017), h.9

¹⁹ Penulisan tahun 1427 H menandakan tahun dirumuskannya kurikulum pengkaderan KAMMI.

²⁰ Penulisan tahun 1433 H merupakan hal yang lazim dalam mengubah kurikulum dengan mencantumkan tahun dilakukannya perubahan tersebut.

pengkaderannya, walaupun orientasi dasar pengkaderannya tetap menghasilkan kader KAMMI yang memiliki karakter Muslim Negarawan.

Perjalanan KAMMI sebagai sebuah organisasi mahasiswa ekstra-kampus sejak kelahiran hingga tahun-tahun setelahnya menuai pro-kontra dan berbagai kontroversi, dideklarasikannya KAMMI setelah Mukhtamar X FSLDK saja sudah terdapat pro-kontra apakah kelahiran KAMMI merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta delegasi atau hanya inisiatif sekelompok orang? Ketika Partai Keadilan (PK) dideklarasikan oleh gerakan Tarbiyah membuat independensi KAMMI juga dipertanyakan karena KAMMI disinyalir lahir atas inisiatif gerakan Tarbiyah.

Kontroversi selanjutnya, yaitu pada tahun 2016 KAMMI dianggap sebagai salah satu organisasi yang menyebarkan paham radikalisme ideologi di kampus, hal tersebut disampaikan oleh Anas Saidi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyatakan bahwa KAMMI melakukan radikalisme ideologi dengan cita-cita mendirikan negara Islam versi mereka sendiri.²¹ Dua tahun berselang pernyataan serupa juga disampaikan oleh cendekiawan muslim Azyumardi Azra yang menyatakan paham radikal makin marak di kampus disebabkan oleh kalangan Islamis yang cenderung jihadis seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang secara tidak resmi berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera

²¹ Prima Gumilang, 2016. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160218193025-12-111927/radikalisme-ideologi-menguasai-kampus>

(PKS).²² Pada tahun 2019 temuan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM UNUSIA) menyatakan bahwa di kampus negeri tumbuh subur gerakan Islam eksklusif, yaitu salah satunya KAMMI yang dianggap mengidealkan penerapan syariat Islam dan berdirinya negara Islam.²³

Berdasarkan perjalanan historis, pro-kontra dan kontroversi mengenai KAMMI, peneliti tertarik mengambil topik penelitian sejarah, yakni “Perkembangan Sistem Kaderisasi KAMMI 1998-2015: Mencetak Muslim Negerawan.” Peneliti ingin mendalami bagaimana proses kelahiran KAMMI dan kaitannya dengan berbagai organisasi yang dianggap memiliki peran dalam kelahiran maupun pemikiran KAMMI, yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), gerakan Tarbiyah, dan Partai Keadilan (kemudian bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera).

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan sistem kaderisasi KAMMI sejak kelahirannya, yaitu pada tahun 1998 hingga 2015 yang terdapat 3 periodisasi penerapan sistem kaderisasi yaitu (1) periode 1998-2005 yang mana sistem kaderisasi KAMMI belum sistematis dan baku dalam bentuk buku dan masih mengacu pada AD/ART dan GBHO, (2) periode 2006-2011 sistem kaderisasi KAMMI sudah disusun dalam bentuk buku sebagai kurikulum pengkaderan atau pedoman pengelolaan pengkaderan nasional yang bernama

²² Bangun Santoso dan Nikolaus Tolen, 2018. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 dari <https://www.suara.com/news/2018/07/10/145016/azyumardi-azra-ldk-dan-kammi-picu-radikalisme-kampus>

²³ Rivan Dwiastono, 2019. Diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48754115>

Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M, dan (3) periode 2011-2015 sistem kaderisasi KAMMI mengalami perubahan dan berganti nama menjadi *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M, selain itu peneliti juga ingin meneliti apakah sistem kaderisasi KAMMI mengajarkan atau menyebarkan paham radikalisme kepada para kadernya seperti yang diberitakan berbagai media massa yang telah dikutip peneliti di halaman sebelumnya. Terakhir, peneliti ingin mengetahui alasan mengapa KAMMI merumuskan dan menetapkan Muslim Negarawan sebagai orientasi dasar pengkaderannya, yang mana frasa “Negarawan” cenderung berkonotasi politik (?).

Adapun kajian yang relevan dengan penelitian yang peneliti temukan, yaitu: tesis yang ditulis oleh Mahfudz Sidiq Mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional yang berjudul “Peran Politik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam Perjuangan Reformasi di Indonesia tahun 1998-2001” tahun 2003, kemudian dibukukan dengan judul “KAMMI dan Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang sejarah kelahiran KAMMI, mulai dari aspek ideologi hingga politik dan peran perubahan yang dijalankannya sejak kelahiran hingga berakhirnya pemerintahan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001.

Penelitian berikutnya yang peneliti temukan, yaitu skripsi dengan judul “Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia: Kajian Sejarah Perjalanan KAMMI Sebagai Gerakan Mahasiswa Masa Reformasi” tahun 2009, penelitian

ini ditulis oleh Arief Pandu Wijonarko mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi dan membahas KAMMI dari berbagai aspek seperti aspek ideologis, kepemimpinan, politik, dan keagamaan.

Penelitian selanjutnya, yaitu skripsi berjudul “Kajian tentang KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa” tahun 2013 ini adalah karya Nur Indah Wahyuni, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai program KAMMI sebagai sarana pendidikan politik mahasiswa dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya serta tindak lanjut proses pendidikan politik bagi anggota KAMMI yang telah lulus sarjana, penelitian ini berfokus pada 2 tempat yaitu KAMMI Komisariat Unnes dan KAMMI Komisariat Sholahuddin Al-Ayyubi UNS.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti menemukan persamaan dengan penelitian ini, yaitu mengkaji KAMMI sebagai objek penelitiannya, sedangkan perbedaannya lebih kepada fokus penelitiannya jika penelitian-penelitian di atas berfokus pada latar belakang kelahiran, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa di era reformasi dan perannya dalam pendidikan politik mahasiswa, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada sistem kaderisasi yang dijalankan oleh KAMMI secara nasional.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini dibutuhkan untuk menjelaskan perkembangan sistem kaderisasi KAMMI pada tahun 1998 hingga 2015, secara **tematis** peneliti akan menjelaskan proses kelahiran KAMMI dan kaitannya secara historis serta pemikiran dengan berbagai organisasi. Penelitian ini juga akan memaparkan mengenai perkembangan sistem kaderisasi KAMMI sejak tahun 1998 hingga 2015, sistem kaderisasi merupakan serangkaian kegiatan yang teratur dan berkesinambungan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terdidik sehingga menghasilkan para pemimpin dan kader yang memiliki peran penting dan nilai sesuai visi-misi suatu organisasi. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan mengenai Muslim Negerawan, Muslim Negerawan merupakan orientasi dasar pengkaderan KAMMI atau *profile* ideal kader KAMMI yang memiliki basis ideologi Islam yang mengakar, basis pengetahuan, dan pemikiran yang mapan, idealis, dan konsisten, berkontribusi pada pemecahan problematika umat dan bangsa serta mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan.²⁴

Batasan **tempat** (*spatial*), peneliti membatasi penelitian mengenai sistem kaderisasi KAMMI ini pada tingkat pusat atau nasional, hal ini karena sistem kaderisasi KAMMI yang telah disusun dalam bentuk buku bernama *Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M* dan *Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433*

²⁴ Rijalul Imam, *Menyiapkan Momentum: Refleksi Paradigmatik Pemikiran Gerakan Pemuda untuk Membangun Bangsa* (Surabaya: Pustaka Saga : 2016), h.90

H/2011 M disusun oleh Departemen Kaderisasi PP KAMMI dan ditetapkan dalam agenda Mukhtar KAMMI yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat KAMMI. Oleh karena itu, kebijakannya akan disebarluaskan kepada seluruh wilayah, daerah, dan komisariat seluruh Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dalam membuat pengelolaan pengkaderan yang meliputi perekrutan, pembinaan, dan pengkaryaan kader KAMMI.

Batasan **waktu** (*temporal*), dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan sejarah perkembangan sistem kaderisasi KAMMI sejak tahun 1998 hingga 2015, tahun 1998 dipilih sebagai batasan awal penelitian disebabkan ada tahun tersebut sistem kaderisasi KAMMI telah diimplementasikan setelah Mukhtar I Nasional KAMMI pada 1-4 Oktober 1998 di Islamic Center Bekasi. Sedangkan, batasan akhir dari penelitian ini adalah tahun 2015, tahun 2015 ditetapkan sebagai batasan akhir penelitian ini karena pada tahun 2015 *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M sudah tidak lagi digunakan dan telah mengalami pergantian sistem kaderisasi KAMMI yang baru, yaitu *Manhaj* Pengkaderan KAMMI (MPK).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran, pembatasan spasial dan pembatasan temporal maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian sejarah “Perkembangan Sistem Kaderisasi KAMMI 1998-2015: Mencetak Muslim Negerawan” adalah sebagai berikut:

1. Mengapa KAMMI lahir dan bagaimana proses kelahirannya?

2. Bagaimana sistem kaderisasi KAMMI pada periode 1998-2015?
3. Mengapa Muslim Negarawan dipilih sebagai orientasi dasar pengkaderan KAMMI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan data empiris dan mendeskripsikan proses kelahiran KAMMI dan perkembangan sistem kaderisasinya sejak tahun 1998 hingga 2015, yaitu sistem kaderisasi KAMMI (1) periode 1998-2005 yang mana sistem kaderisasi KAMMI belum sistematis dan baku dalam bentuk buku serta masih berpatokan pada AD/ART dan GBHO, (2) periode 2006-2011 sistem kaderisasi KAMMI sudah disusun dalam bentuk buku sebagai kurikulum pengkaderan atau pedoman pengelolaan pengkaderan nasional yang bernama *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M, dan (3) periode 2011-2015 sistem kaderisasi KAMMI mengalami perubahan dan berganti nama menjadi *Manhaj* Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M. selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai orientasi dasar pengkaderan KAMMI, yakni Muslim Negarawan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan dari segi kegunaan, ditinjau dari segi akademis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang ideologi gerakan, pengkaderan organisasi mahasiswa dan dijadikan sebagai referensi tambahan bagi yang berminat tentang sejarah gerakan organisasi mahasiswa ekstra-kampus. Hal

tersebut karena penelitian ini membahas seluk-beluk terkait sejarah kelahiran dan perkembangan sistem kaderisasi organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus, yaitu KAMMI yang tersusun dalam suatu buku kurikulum pengkaderan yang bernama *Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H/2006 M* dan *Manhaj Kaderisasi KAMMI 1433 H/2011 M*.

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Oleh karena itu, dalam upaya merekonstruksi peristiwa masa lalu dari objek yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode sejarah. Pada metode sejarah terdapat lima tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Kelima tahap tersebut adalah 1. Pemilihan topik, 2. Pengumpulan sumber (heuristik), 3. Kritik sumber (verifikasi), 4. Penafsiran (interpretasi), dan 5. Penelitian (historiografi).²⁵ Selain menggunakan metode sejarah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-naratif, hal tersebut bertujuan agar memudahkan peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan tentang perkembangan sistem kaderisasi KAMMI.

Tahap *pertama* adalah pemilihan topik, topik penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan atau diatasi melalui penelitian ilmiah.²⁶ Dalam penelitian ini topik yang dipilih ialah “Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), peneliti tertarik untuk mengambil topik tersebut disebabkan keterlibatan peneliti dalam organisasi KAMMI dan belum banyak yang meneliti

²⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), h.89

²⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h.44

terkait KAMMI terutama mengenai sistem kaderisasinya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih komprehensif mengenai sejarah kelahiran KAMMI terutama yang berkaitan dengan perkembangan sistem kaderisasinya.

Tahap *kedua* adalah pengumpulan sumber (*heuristik*), pengumpulan data atau sumber dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan dokumen.²⁷ Metode ini dapat berlangsung karena ditemukan sumber-sumber tertulis baik yang memberikan informasi di sekitar objek maupun informasi langsung mengenai perkembangan sistem kaderisasi KAMMI, seperti buku yang berjudul *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus* karya Andi Rahmat dan Muhammad Najib, dalam buku tersebut dijelaskan sejarah perjuangan KAMMI sebagai sebuah organisasi yang memiliki andil dalam transisi orde baru menuju reformasi dan masjid menjadi bagian penting dalam proses pembinaan serta pengkaderan mahasiswa muslim.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Mahfudz Sidiq berjudul *KAMMI dan Pergulatan Reformasi* juga menjadi rujukan utama peneliti bagaimana organisasi KAMMI terbentuk, buku yang ditulis pada tahun 2003 ini mencoba menganalisis peran yang dilakukan KAMMI selama kurun waktu tiga tahun pertama pada masa transisi demokrasi (1998-2001). Buku *Ijtihad Membangun Basis Gerakan* yang ditulis Amin Sudarsono pada tahun 2010 menjelaskan tentang refleksi kelahiran KAMMI dan gagasan-gagasan KAMMI terutama terkait ideologi gerakan, politik, sosial, dan dakwah, bukan hanya itu dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai persoalan teknis dalam membangun sebuah organisasi pergerakan.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1989), h.45

Buku *KAMMI, Beyond Politics* yang ditulis Dharma Setyawan mencoba memaparkan bahwa peran kader KAMMI tidak hanya dalam bidang politik praktis saja tetapi juga dapat memahami, meresapi, dan mengaktualisasikan ideologi gerakan secara kreatif sehingga segmentasi kehidupan yang akan dilewati oleh anggota KAMMI yang multisektor ini akan sangat luas. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh aktivis KAMMI yang dimuat dalam buku *Capita Selecta KAMMI* berisi mengenai gagasan-gagasan KAMMI dalam membangun Indonesia di bidang pendidikan, politik, pertahanan negara, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi syariah serta ide-ide tentang merekonstruksi arah gerakan KAMMI yang sudah memasuki 1 dasawarsa perjuangannya dalam upaya membangun Indonesia.

Selain menggunakan sumber tertulis, observasi lapangan dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh antara lain: Emas Rahayu, Novri Helmawan, Rijalul Imam, dan Mohan. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan peneliti adalah berupa sejarah lisan, yaitu dari tokoh-tokoh yang langsung mengalami peristiwa baik sebagai tokoh utama maupun pengikutnya, atau orang yang langsung mendengar dari saksi pertama.²⁸ Metode sejarah lisan ini digunakan sebagai metode pelengkap terhadap bahan dokumenter,²⁹ pengumpulan data dengan wawancara atau sejarah lisan ini juga penting dilakukan karena sebagai perbandingan data yang diperoleh dari buku, jurnal dan media cetak.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Op.Cit.*, h.92

²⁹ Kuntowioyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994), h.23

Tahap *ketiga* adalah kritik sumber (*verifikasi*). Konsekuensi logis di dalam penelitian sejarah, bahwa sumber-sumber yang telah didapatkan itu kemudian diuji keasliannya melalui kritik intern dan ekstern. Kritik intern, yakni menilai kredibilitas data atau informasi dalam sumber dan membandingkan apakah sesuai dengan hasil wawancara narasumber. Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap sumber.³⁰ Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi, membandingkan, dan menguji data, sehingga dapat diperoleh fakta.

Tahap *keempat*, yaitu interpretasi. Setelah melakukan kritik sumber langkah selanjutnya ialah data dan fakta yang sudah diseleksi itu kemudian ditafsirkan makna dan hubungan satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga data dan fakta tersebut dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah.

Tahap *kelima* adalah historiografi yaitu, kegiatan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah dengan merangkai fakta secara sistematis, logis, dan jelas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari prosedur penelitian sejarah dengan selalu memperhatikan aspek kronologis, sedangkan penyajiannya berdasarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian.³¹ Sebagai tahap terakhir dalam metode sejarah, historiografi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-naratif untuk menggambarkan dan

³⁰ Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.36

³¹ Dudung Abdurrahman, *Op.Cit.*, h.93

menganalisis sejarah perkembangan sistem kaderisasi KAMMI Tahun 1998-2015 sehingga penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami.

